

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya latar belakang dalam sebuah penelitian tentunya didasarkan pada ihwal ide atau gagasan yang memicu ketertarikan peneliti untuk melakukan riset terhadap populasi pada lokasi tertentu. Hal ini pun menjadi basis problematika dalam konteks penelitian yang pada akhirnya mendorong inisiatif peneliti untuk melaksanakan penelitian.¹ Adapun penelitian ini menggambarkan persoalan yang bersifat umum berturut-turut hingga sampai pada yang mengerucut agar pembaca dapat memahami kenapa penelitian ini dilakukan.²

Good governance memiliki peran krusial dalam menunjang proses pembangunan di setiap negara. Konsep ini diadopsi sebagai pendekatan strategis yang didorong oleh *International Monetary Fund* (IMF) yang berorientasi terhadap aspek-aspek yang saling berkaitan erat dengan kebijakan makroekonomi. Aspek-aspek tersebut meliputi transparansi dalam laporan keuangan negara, efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik, serta terciptanya stabilitas dan keterbukaan dalam sistem ekonomi dan regulasi yang mengatur kegiatan sektor swasta.³ Pasca reformasi prinsip-prinsip *good governance* mulai dipopulerkan di

¹ Manotar Tampubolon. 2023. *Metode Penelitian*. PT. Global Eksekutif Teknologi. Padang, Sumatera Barat, hlm 77.

² Ketut Oka Setiawan dan Tetti Samosir. 2023. *Metodologi Penelitian Hukum*. Penerbit Reka Cipta. Bandung, Jawa Barat, hlm 72.

³ Rivai dan Bastari. 2019. *Paradoks Penerapan Good Governance Indonesia: Suatu Tinjauan Kritis MP3EI*. Jurnal Politik Profetik, Vol. 7, No. 2, hlm. 183.

Indonesia.⁴ Munculnya problematika bangsa dan negara yang merupakan dampak dari sistem pemerintahan orde baru mendapatkan tuntutan dari masyarakat termasuk menyoal mengenai isu korupsi, kolusi, dan nepotisme yang marak terjadi kala itu.⁵ Begitu banyaknya yang menyoal keberfungsian lembaga negara yang terlihat mandek karena episentrum kekuasaan terletak pada hegemoni yang kuat terhadap eksistensi kedudukan Presiden. Kontrol sosial seperti partisipasi masyarakat ikut tersumbat. Padahal kontrol sosial yang bersifat membangun serta kesiapan masyarakat dalam menghadapi berbagai dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan sangatlah penting. Keterlibatan aktif masyarakat mencerminkan implementasi nyata dari prinsip kedaulatan rakyat.⁶ Meskipun sampai saat ini, pemahaman mengenai apa dan bagaimana prinsip-prinsip *good governance* dijalankan belum sepenuhnya dipahami bersama, Pemerintah tetap mempunyai komitmen untuk menjadikan *good governance* sebagai landasan atau pondasi nilai pemerintahan.⁷

Sementara itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana hubungan implementasi fungsi legislatif yang berkenaan dengan sistem kerja organisasi yang regulatif (pembuatan kebijakan melalui peraturan daerah) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka mengoptimalkan upaya pemerintah daerah menciptakan pelayanan publik berbasis pada prinsip-prinsip *good governance*. Hal

⁴ Fauza Andriyadi. 2019. *Good Governance Government and Government*. Jurnal LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, Vol. 1, No. 2, hlm. 87.

⁵ Rimadany Chusata. 2024. *Dampak Kebijakan Pemerintahan Orde Baru dan Perubahan Sosial Terhadap Perkembangan Pendidikan Anak Tahanan G30S di Pulau Buru 1969-1976*. Jurnal LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren, Vol. 2, No. 1, hlm. 150.

⁶ Siti Hidayati. 2019. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia dengan Afrika Selatan)*. Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 3, No. 2, hlm. 234.

⁷ Ipan Nurhidayat. 2023. *Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia*. Journal E-Gov Wiyata : Education and Government, Vol 1, No 1, hlm 42.

ini dilakukan sebagai komitmen pemerintah daerah mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien. Sebagaimana diketahui implementasi prinsip-prinsip *good governance* mengacu pada beberapa aspek fundamen dan esensial yakni partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi, stakeholders, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.⁸

Urgensi penerapan prinsip-prinsip *good governance* adalah keniscayaan di dalam sebuah pemerintahan tanpa terkecuali di DPRD. Prinsip-prinsip *good governance* yang dimaksud dapat memberikan kepastian terhadap keberlanjutan eksistensi organisasi birokrasi karena memiliki kebermanfaatan seperti menciptakan kestabilan politik, mempercepat pembangunan ekonomi, pemberantasan korupsi, menciptakan efisiensi administrasi publik, mendorong partisipasi publik yang lebih besar, peningkatan transparansi, perlindungan hak asasi manusia.⁹

Namun untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip *good governance* dapat dijalankan dengan baik oleh pemerintah di daerah maka dibutuhkan kerjasama yang baik antar penyelenggara pemerintah daerah.¹⁰ Penyelenggara pemerintah di daerah memainkan peranan strategi agar memperkuat penerapan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana menjadi komitmen bersama yang melibatkan Kepala Daerah dan DPRD yang dibantu oleh perangkat daerah lainnya.¹¹ Apalagi

⁸ Manotar Tampubolon, Nelson Simajuntak, dan Fernando Silalahi. 2023. *Birokrasi dan Good Governance*. PT. Global Eksekutif Teknologi. Padang, Sumatera Barat, hlm. 38-43.

⁹ *Ibid*, hlm 51-52.

¹⁰ Andi Utami. 2022. *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Merumuskan Program Kebijakan Pembangunan Daerah di Bappedalitbang Kabupaten Mamasa*. Jurnal Arajang: Jurnal Ilmu Sosial Politik, Vol. 5, No. 1, hlm. 79.

¹¹ Indonesia. Pasal 57, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya mengenai pembentukan Perda yang memuat harapan dan kebutuhan masyarakat tidak sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah namun merupakan tanggung jawab bersama (*joint responsibility*) antara DPRD dan Pemerintah Daerah.¹²

Seperti diketahui bersama bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif di tingkat daerah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya.¹³ Salah satu fungsi utama DPRD adalah fungsi legislasi, yang mencakup pembuatan, pengesahan, dan pengawasan peraturan daerah. Implementasi fungsi ini sangat krusial dalam menciptakan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.¹⁴ Sehingga dengan menjalankan fungsi legislasi yang efektif, DPRD dapat memastikan terciptanya regulasi yang adil dan mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat, sekaligus memperkuat struktur kelembagaan yang mendukung demokrasi yang kokoh dan partisipatif di tingkat daerah mencakup upaya membangun institusi-institusi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Hal ini melibatkan penguatan kapasitas pemerintah daerah, peningkatan kualitas birokrasi, serta penyediaan ruang partisipasi publik yang inklusif dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan kebijakan. Selain itu, diperlukan sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan

¹² Arifuddin. 2020. *Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pembentukan Daerah*. Jurnal Al-ISLAH: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 23, No. 1, hlm. 58.

¹³ Elshi Elvira, et al. 2024. *Kewenangan DPRD dan Kepala Daerah Dalam Menetapkan Peraturan Daerah*. Jurnal Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara (SiyasahSyar'iah), Vol. 2, No. 2, hlm. 68.

¹⁴ Sudasono, Riban Satia, dan Yusuf. 2022. *Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Kajian di Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Tengah)*. Jurnal Pencerah Publik, hlm 41.

masyarakat sipil untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang adil dan berorientasi pada pelayanan publik.¹⁵

Adapun proses legislasi di DPRD dimulai dengan penyusunan rancangan peraturan daerah atau disebut sebagai Raperda.¹⁶ Raperda ini dapat diusulkan oleh pemerintah daerah atau oleh anggota DPRD itu sendiri. Usulan dari pemerintah biasanya berkaitan dengan kebijakan yang mendukung pelaksanaan program pembangunan, sedangkan usulan dari anggota DPRD acap kali berasal dari aspirasi masyarakat yang disampaikan. Pasca Raperda diajukan, DPRD mengadakan pembahasan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk komisi-komisi di DPRD dan stakeholder terkait. Proses ini bertujuan untuk menggali lebih dalam substansi Raperda serta mempertimbangkan masukan dari masyarakat. Melalui kegiatan audiensi, forum diskusi, dan rapat kerja, DPRD memastikan bahwa semua perspektif dipertimbangkan sebelum Raperda dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Kemudian apabila telah mendapatkan masukan dan melakukan pembahasan mendalam, DPRD melakukan pengambilan suara untuk mengesahkan Raperda menjadi peraturan daerah (Perda). Pengesahan ini biasanya dilakukan dalam sidang paripurna, yang melibatkan seluruh anggota DPRD. Dalam tahap ini, penting bagi setiap anggota untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya, memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah representatif.

¹⁵ Idhan Domingus dan Alwadud Lule. 2024. *Evaluasi Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Tahun 2019-2022*. Jurnal Musamus Journal of Public Administration, Vol. 10, No. 10, hlm. 43.

¹⁶ Rahmawati. 2023. *Pembentukan Peraturan Daerah Polewali Mandar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pandangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jurnal Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik, Vol. 7, No. 3, hlm. 333.

Proses legislasi tidak hanya berfokus pada pengesahan, tetapi juga pada pengawasan terhadap pelaksanaan Perda. Setelah Perda ditetapkan, DPRD berperan dalam memantau implementasi dan evaluasi efektivitasnya di lapangan. Jika terdapat masalah atau hambatan dalam pelaksanaan Perda, DPRD memiliki kewenangan untuk mengusulkan revisi atau penyesuaian. Meskipun DPRD memiliki tanggung jawab yang besar dalam fungsi legislasi, berbagai kendala sering kali dihadapi. Salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia yang memahami substansi peraturan yang sedang dibahas. Disamping itu pula minimnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dapat mengakibatkan Raperda yang dihasilkan tidak mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan.¹⁷ Selain itu, faktor politik dan kepentingan individu atau kelompok juga bisa memengaruhi objektivitas dalam proses legislasi.¹⁸ Dalam beberapa kasus, terdapat tekanan dari pihak tertentu yang berusaha memengaruhi isi dan substansi dari Perda demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Jika kondisi seperti ini terjadi yang tidak adanya koherensi baik Kepala Daerah maupun DPRD justru dapat menimbulkan problematika komunikasi politik antar lembaga karena dipicu oleh konflik kepentingan yang cenderung kontraproduktif. Penyelenggaraan pemerintahan daerah pun ikut terganggu.¹⁹

¹⁷ Dania Maulinda, et al. 2024. *Minimnya Pemberian Ruang Partisipan serta Transparansi oleh DPR kepada Rakyat dalam Pembuatan Undang-Undang*. Jurnal Hukum dan Sosial Politik, Vol. 2, No. 3, hlm 246.

¹⁸ Abdul Latif. 2019. *Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol. 1, No. 1, hlm. 44-45.

¹⁹ Anastacia Patricia Novlina Nurak dan Sri Budi Eko Wardani. 2023. *Konflik Kepentingan Antara Pimpinan Daerah dan DPRD Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah*. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik, Vol 3, No 1, hlm 3.

Dalam rangka meningkatkan kualitas fungsi legislasi, DPRD perlu memperkuat kapasitas anggota melalui pelatihan dan pendidikan yang berkesinambungan. Pengetahuan yang memadai mengenai hukum, administrasi publik, dan kebutuhan masyarakat akan membantu anggota DPRD dalam menyusun regulasi yang lebih baik. Termasuk peran DPRD untuk menguatkan eksistensi pemerintahan di daerah.

Peningkatan transparansi dalam proses legislasi juga penting melalui keterlibatan masyarakat menjadi aspek krusial dalam menciptakan produk hukum yang tanggap terhadap kebutuhan.²⁰ Dengan melibatkan masyarakat dalam diskusi dan memberikan akses informasi yang luas, DPRD dapat memastikan bahwa Raperda yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat merupakan manifestasi eksistensi prinsip-prinsip *good governance* yakni partisipasi masyarakat. Hal ini jelas akan memberikan kepastian bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara pemerintahan termasuk di daerah semata-mata bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.²¹

Di Kabupaten Gorontalo Utara, rancangan Peraturan Daerah dari tahun ke tahun mengalami penurunan dari sisi kuantitas. Misalnya pada tahun 2019 terdapat 6 Perda yang dibuat oleh DPRD. Sedangkan tahun 2022 ada 3 Perda dan tahun 2023 ada 5 Perda. Di sisi lain Perda usulan dari Pemerintah Daerah turut mengalami penurunan dari tahun 2019 sebanyak 11 Perda, sedangkan pada tahun

²⁰ Gugun El dan Okky Alifka.2021. *Omnibus Law di Indonesia: Legislasi Nihil Transparansi dan Partisipasi*. Jurnal POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, Vol. 8, No. 2, hlm.52.

²¹ Abdul Manaf. 2016. *Good Governance dan Pelayanan Publik*. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, hlm 6.

2023 hanya 4 Perda. Meskipun demikian, DPRD dalam pembuatan Perda selalu mengedepankan prinsip-prinsip *good governance* seperti pada saat pembuatan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diupayakan memuat program yang berbasis pada pelayanan publik terhadap kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial. Bahkan DPRD telah menggunakan hak interpelasi, dan hak angket untuk mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* setiap kali pembuatan Perda termasuk usulan dari Pemerintah Daerah. Proses revisi dan evaluasi konsisten dilakukan oleh DPRD. Salah satu dari upaya DPRD untuk mengoptimalkan agar setiap kebijakan memenuhi prinsip-prinsip *good governance* diantaranya DPRD telah membuat Perda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, dan juga Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.²²

Disamping itu, penurunan kuantitas Perda setiap tahunnya disebabkan oleh masih tingginya ego sektoral baik Pemerintah Daerah maupun DPRD di Kabupaten Gorontalo Utara. Komunikasi politik antar lembaga tersebut acap kali tidak berjalan dengan baik. Hal ini pun menjadi hambatan utama dalam mencapai kesepakatan politik kebijakan dalam pembuatan Perda. Akhirnya perda yang seharusnya selesai pada masa propemperda yang telah disepakati justru tidak dapat dipenuhi sesuai waktu yang telah diputuskan.²³

²² Bagian Hukum dan Persidangan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.

²³ Bagian Protokoler dan Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.

Belum lagi, persoalan peraturan perundang-undangan turunan dari pusat ke daerah (Provinsi) belum memadai, sehingga upaya DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dalam mengupayakan Perda tidak berjalan sebagaimana mestinya.²⁴ Perubahan peraturan perundang-undangan yang terjadi di tingkat pusat menyebabkan DPRD cenderung dipaksa untuk segera beradaptasi meskipun hal ini tidak berbanding lurus dengan evaluasi berkala ke wilayah Kabupaten Gorontalo Utara oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai penanggungjawab dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

Namun pada tahun 2023 yang lalu, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara meraih penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia dengan predikat terbaik dalam pelayanan publik. Adapun meraih penghargaan tersebut diberikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara. Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara mengungguli tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara.²⁶

Berdasarkan konstelasi dan fakta tersebut maka penulis beranggapan bahwa pentingnya pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana hubungan

²⁴ Bagian Hukum dan Persidangan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.

²⁵ Indonesia. Pasal 5 huruf a, Peraturan Presiden Nomor 114 Tentang Kementerian Dalam Negeri.

²⁶ Susanti Sako. 30 Januari 2024. Dinkes Gorontalo Utara Raih Predikat Terbaik Penilaian Layanan Publik. Diakses dari: <https://gorontalo.antaranews.com/berita/235320/dinkes-gorontalo-utara-raih-predikat-terbaik-penilaian-layanan-publik> pada pukul 11 November 2024, pukul 16.45 WIB.

implementasi fungsi legislasi DPRD terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Selain itu juga dalam tesis ini, penulis akan mendeskripsikan sejauh mana pengaruh fungsi legislasi DPRD terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Faktor-faktor penyebab seperti dinamika, komunikasi, dan potensi konflik yang terjadi selama proses legislasi dan pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* di Kabupaten Gorontalo Utara diuraikan secara gamblang melalui penelitian ini.

B. Hipotesis

Hipotesis penelitian dirumuskan berdasarkan pemahaman terhadap proses, terutama yang berkaitan dengan landasan media serta dalil atau teori yang relevan dengan kasus atau fenomena yang menjadi fokus penelitian. Pada dasarnya, penyusunan hipotesis membutuhkan pemikiran logis yang didasarkan pada teori, dalil, dan fenomena faktual untuk menjawab pertanyaan penelitian.²⁷

Dalam penelitian ini terdapat hipotesis. Seperti diketahui bahwa hipotesis merupakan dugaan sementara atas suatu permasalahan yang sedang diteliti. Oleh karena hipotesis berorientasi pada dugaan sementara, maka dalam hal ini hipotesis penting untuk dibuktikan kesahihannya. Adapun pembuktian ini dapat dilakukan melalui data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan metode analisis statistik. Jika hipotesis telah terbukti kebenarannya, maka disebut sebagai

²⁷ Jim Yam dan Ruhayat. 2021. *Hipotesis Penelitian Kuantitatif*. Jurnal PERSPEKTIF: Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 3, No. 2, hlm. 97.

teori. Hipotesis ini baru dugaan dari rumusan masalah penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya bukan kenyataannya.²⁸

Menurut Hardani *et al* (2020), hipotesis merupakan alat yang sangat efektif dalam menentukan kebenaran atau kesalahan suatu pernyataan, dengan menjaga objektivitas dan menghindari bias dari nilai atau pandangan pribadi peneliti yang merumuskan dan mengujinya. Sementara itu, Gulo (2002) menjelaskan bahwa hipotesis dirumuskan berdasarkan tujuan awal penelitian, yakni untuk mengeksplorasi sesuatu yang diyakini sebagai kebenaran pada tingkat tertentu. Proses ini dilakukan dengan merumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan, memberikan jawaban sementara berdasarkan dugaan awal, dan membuktikannya melalui studi empiris.²⁹

Soesilo dalam Karimuddin (2022)³⁰ menyebutkan bahwa terdapat ciri-ciri hipotesis yang harus dipenuhi peneliti adalah:

1. Peneliti harus konsisten mengenai isu hipotesis.
2. Hipotesis ditulis dalam bentuk pernyataan bukan kalimat Tanya yang berdasarkan pada landasan teori.
3. Hipotesis dalam penelitian ekperimental dapat menyatakan pengaruh, perbedaan dan efektivitas antar variabel.
4. Hipotesis harus dapat diuji.

²⁸ Rizka Zulfikar, *et al*. 2024. *Metode Penelitian Kuantitatif (Teori, Metode dan Praktik)*. Widina Media Utama, Bandung, Jawa Barat, hlm 43.

²⁹ Sri Rochani. 2021. *Metodologi Penelitian*. Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, Jawa Barat, hlm. 23.

³⁰ Karimuddin Abdullah, *et al*. 2022. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, hlm 52.

Berdasarkan latar belakang hingga temuan sementara atas penelitian ini, maka penulis menyampaikan Hipotesis (H) dalam penelitian ini yakni:

H1: Terdapat dugaan hubungan implementasi fungsi legislasi DPRD dengan optimalisasi prinsip-prinsip *good governance* di Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

H2: Tidak terdapat hubungan implementasi fungsi legislasi DPRD dengan optimalisasi prinsip-prinsip *good governance* di Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

H3: Terdapat dugaan pengaruh hubungan implementasi fungsi legislasi DPRD terhadap optimalisasi prinsip-prinsip *good governance* di Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

H4: Tidak terdapat pengaruh hubungan implementasi fungsi legislasi DPRD terhadap optimalisasi prinsip-prinsip *good governance* di Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya telah diuraikan maka peneliti kemudian merumuskan masalah yang menjadi persoalan yang ingin diteliti untuk ditemukan jawabannya. Hanitijo dalam Muhaimin (2020) menyebutkan bahwa rumusan masalah berasal dari ketidakselarasnya antara harapan dengan kenyataan sehingga menciptakan jarak. Dalam rumusan masalah juga menunjukkan *antara das solen* (yang seharusnya) dengan *das sein* (yang senyatanya) yang sering kali tidak

berbanding lurus. Hal ini pun menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara norma yang berlaku, rasa keadilan yang tidak terpenuhi, serta kebijakan yang tidak sesuai harapan.³¹

Selain itu agar menghindari terjadinya kesalahan dalam merumuskan masalah diperlukan ketepatan dalam pengumpulan data secara terinci serta mengungkapkan korelasi antara dua variabel atau lebih.³² Beberapa kriteria untuk merumuskan masalah penelitian yang baik dapat diuraikan sebagai berikut³³:

1. Rumusan masalah yang baik harus mampu dijawab secara komprehensif.
2. Rumusan masalah harus mengidentifikasi variabel dan menggambarkan hubungan yang terkait dengan penelitian.
3. Rumusan masalah harus dapat diuji melalui analisis data.
4. Rumusan masalah sebaiknya didahului dengan latar belakang dan diikuti dengan tujuan penelitian.

Pada umumnya terdapat beragam kasus, rumusan masalah dapat berupa serangkaian pertanyaan yang disampaikan dalam bentuk kalimat. Apalagi masalah penelitian justru memainkan peranan penting sehingga dapat mempengaruhi hasil dari penelitian. Tentunya masalah penelitian telah terlebih dahulu dirumuskan oleh

³¹ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram, Nusa Tenggara Barat, hlm 39.

³² Ketut Oka Setiawan dan Tetti Samosir. 2023. *Metodologi Penelitian Hukum*. Penerbit Reka Cipta. Bandung, Jawa Barat, hlm 75.

³³ Tamaulina, *et al.* 2024. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Teori Dan Praktik)*. CV. Saba Jaya Publisir, Karawang, Jawa Barat, hlm 40.

peneliti. Dalam hal ini diperlukan akurasi dengan standarisasi penyelidikan yang ilmiah.³⁴

Jadi setelah peneliti memaparkan latar belakang mengenai implementasi fungsi legislasi DPRD dalam rangka optimalisasi prinsip-prinsip *good governance* Pemerintah Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara terdapat beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan implementasi fungsi legislasi DPRD dengan optimalisasi prinsip-prinsip *good governance* Pemerintah Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara?
2. Apakah hubungan implementasi fungsi legislasi DPRD mempengaruhi optimalisasi prinsip-prinsip *good governance* Pemerintah Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara?

D. Tujuan Penelitian

Setelah peneliti menyusun rumusan masalah, langkah selanjutnya yakni merumuskan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini memproyeksikan harapan terhadap jawaban yang diperoleh dari permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam hal mendapatkan tujuan penelitian yang efektif maka tujuan tersebut setidaknya-tidaknya idealnya memenuhi beberapa kriteria yang bersifat spesifik berdasarkan rumusan permasalahan yang ada. Disamping itu tujuan penelitian dapat diukur dan diperiksa melalui hasil penelitian, serta setiap

³⁴ Manotar Tampubolon. 2023. *Metode Penelitian*. PT. Global Eksekutif Teknologi. Padang, Sumatera Barat, hlm 57.

rumusan masalah minimal memiliki satu tujuan penelitian.³⁵ Adapun beberapa kriteria dari tujuan penelitian yang memiliki format pernyataan sebagai berikut:³⁶

1. Tujuan harus ada hubungannya dengan rumusan masalah atau secara eksplisit diarahkan untuk menjawab perumusan masalah.
2. Tujuan penelitian dinyatakan dengan kalimat deklaratif.
3. Tujuan penelitian dikemukakan sebagai sesuatu yang ingin dicapai melalui proses penelitian.
4. Tujuan penelitian harus jelas dan tegas.

Sampai saat ini penerapan prinsip-prinsip *good governance* dianggap ideal sebagai praktik nyata dalam kerja-kerja administrasi publik. Kepercayaan pada prinsip-prinsip *good governance* yang ideal tersebut diyakini dapat meningkatkan ekonomi setiap negara karena mampu memitigasi dan mencegah terjadinya praktik-praktik koruptif di dalam birokrasi pemerintahan. Kendati demikian kritikan terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance* pun tidak terelakan. Pertimbangan akan sistem, budaya, dan kondisi masyarakat turut menjadi variabel penting yang dapat menghambat optimalisasi *good governance* di wilayah tersebut.³⁷

Langkah untuk menyukseskan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya memerlukan

³⁵ Tamaulina, et al. 2024. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Teori Dan Praktik)*. CV. Saba Jaya Publisir, Karawang, Jawa Barat, hlm 42.

³⁶ Amruddin, et al. 2022. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. CV. Pradina Pustaka Grup, Jawa Tengah, hlm 38.

³⁷ Fitria Andalus Handayani dan Mohamad Ichsana Nur. 2019. *Implementasi Good Governance Di Indonesia*. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, Vol. 11, No. 1, hlm 2. DOI: <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>.

upaya untuk memaksimalkan fungsi legislasi DPRD. Bandiyah (2014) dalam Marwan (2019) mengungkapkan bahwa fungsi legislasi digunakan untuk memanifestasikan seluruh harapan masyarakat secara aspiratif dan responsif. Sehingga peranan DPRD yang notabene melekat dan memiliki fungsi legislasi dinilai cukup strategis karena dapat membuat peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum yang mengikat dan bisa mempengaruhi konstelasi sosiologis masyarakat.³⁸

Sebagai penulis, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan juga memahami beberapa hal yang memiliki hubungan dengan implementasi fungsi legislasi DPRD dalam rangka optimalisasi prinsip-prinsip *good governance* Pemerintah Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami bagaimana hubungan implementasi fungsi legislasi DPRD dengan optimalisasi prinsip-prinsip *good governance* Pemerintah Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Memberikan penjelasan apakah hubungan implementasi fungsi legislasi DPRD memiliki pengaruh terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance* Pemerintah Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian seyogianya memiliki kebermanfaatan bagi kepentingan pengembangan program. Disamping itu, kegunaan penelitian juga diperuntukkan

³⁸ Marwan dan Andi Risma. 2019. *Kedudukan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pasca Amandemen UUD 1945*. Jurnal Jurisprudentie, Vol. 6, No. 2, hlm. 268.

agar memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Maka, di dalam kegunaan penelitian harus menguraikan secara rinci mengenai manfaat atau urgensi dilakukannya sebuah penelitian. Dalam hal ini seluruh data akan menjadi informasi yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan dan tentunya memiliki kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan.³⁹

Diharapkan ketika penelitian dilakukan maka penjelasan mengenai data, atau fenomena, latar belakang atau kondisi, sebab akibat suatu peristiwa atau kejadian dapat dideskripsikan, dijabarkan, bahkan diproyeksikan. Selain itu dalam rangka perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini juga diharapkan dapat membuat dan menyusun teori tertentu.⁴⁰ Jadi, dalam penelitian ini terdapat dua unsur kegunaan penelitian yang berhubungan dengan implementasi fungsi legislasi DPRD dalam mengoptimalisasi prinsip-prinsip *good governance* Pemerintah Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memperkaya khazanah pengetahuan dan penerapan konsep hukum tata negara dalam konteks pelaksanaan fungsi legislasi DPRD sebagai lembaga yang berperan strategis dan kemitraan dengan Pemerintah Daerah khususnya berkaitan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Daerah atau Perda yang terdapat di Kabupaten Gorontalo Utara. Selain itu, implikasi fungsi legislasi DPRD juga akan mempengaruhi penerapan *good governance* oleh

³⁹ Wiwik Sri Widiarty. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media, Kota Yogyakarta, hlm. 92.

⁴⁰ Manotar Tampubolon. 2023. *Metode Penelitian*. PT. Global Eksekutif Teknologi. Padang, Sumatera Barat, hlm. 11.

Pemerintah Daerah. Sebagaimana diketahui bahwa *good governance* dapat dijalankan oleh pemerintah karena adanya kewenangan. Kewenangan ini pun menjadi landasan hukum yang sah untuk menyelenggarakan pemerintahan karena bersumber dari peraturan perundang-undangan.⁴¹

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian pada dasarnya merupakan upaya untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari.⁴² Sehingga secara praktis penelitian ini berguna bagi beberapa pihak yang memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD yang kemudian mempengaruhi optimalisasi prinsip-prinsip *good governance* di Pemerintah Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara. Adapun kegunaan praktis bagi beberapa pihak seperti:

a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara

Selain memiliki fungsi pengawasan, fungsi anggaran, DPRD juga memainkan peranan dalam membentuk peraturan perundang-undangan khususnya di daerah. Hal ini berkaitan dengan fungsi DPRD yakni legislasi. Maka dengan adanya penelitian ini, DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dapat memaksimalkan upaya dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* pada saat membuat kebijakan sesuai dengan target dalam program pembentukan peraturan daerah (propempera) selama periode masa jabatan tersebut.

⁴¹ Manotar Tampubolon. 2023. *Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara*. Get Press Indonesia, Padang Sumatera Barat, hlm 67.

⁴² Annisa Paramaswary. 2023. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Tahta Media Group, Sukoharjo, Jawa Tengah, hlm. 3.

b. Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

Salah satu bentuk keseriusan dan komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang memiliki tata kelola yang baik adalah melalui optimalisasi prinsip-prinsip *good governance*. Maka, sudah sepatutnya penelitian ini dilakukan sebagai bahan autokritik terhadap kebijakan yang selama ini belum memenuhi prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, upaya memitigasi konflik kepentingan pada konstelasi pembuatan kebijakan dapat dioptimalkan. Sehingga pencapaian dalam memberikan pelayanan publik yang mumpuni merupakan keniscayaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

c. Praktisi

Adapun kegunaan penelitian ini bagi para praktisi adalah menjadi pemantik bagi ide, gagasan, bahkan inovasi yang transformatif terhadap penguatan fungsi legislasi DPRD dan optimalisasi prinsip-prinsip *good governance* yang berbasis pada kebermanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.

d. Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini memberikan deskripsi bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dan pengaruhnya terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik berbasis *good governance*. Hal ini dapat membantu masyarakat memahami, dan memberikan kritik konstruktif atas kelemahan serta mendukung kebijakan yang dinilai mengandung aspirasi dan harapan publik.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas politik pada negara demokratis pada hakikatnya mengakui kekuasaan politik badan legislatif untuk mempengaruhi eksekutif dalam pengambilan keputusan publik. Dengan kata lain kehadiran akuntabilitas politik yang diperankan oleh legislatif dapat menjamin institusi dan pegawai pemerintah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan publik yang ditetapkan oleh badan legislatif. Eksistensi akuntabilitas politik juga sekaligus dimaksudkan untuk mencegah pemerintah mengambil dan melaksanakan kebijakan-kebijakan publik yang bertentangan dengan keinginan rakyat yang direpresentasikan oleh badan legislatif (Dwivedi dan Jabra, 1989).⁴³

b. Teori Partisipasi Masyarakat

Foster, *et al* (2019) pun mendefenisikan partisipasi masyarakat sebagai proses di mana individu memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Lalu Favero, *et al* (2016) juga memandang bahwa partisipasi masyarakat yang kuat dapat memperkuat norma-norma kepercayaan dan kerjasama yang merupakan fondasi penting bagi demokrasi yang sehat. Kemudian, Van Holm (2019) menunjukkan bahwa tanpa struktur dan mekanisme yang tepat, partisipasi masyarakat dapat dikooptasi oleh kelompok-kelompok yang

⁴³ Amir Imbaruddin. 2016. *Birokrasi Akuntabilitas Kinerja (Sebuah Refleksi)*. De La Macca, Kota Makassar, hlm. 107.

berkepentingan, mengurangi efektivitasnya. Untuk mengatasi hal ini, Lee (2008) menyarankan pendekatan yang lebih inklusif dan *bottom-up* dalam merancang dan melaksanakan program partisipasi masyarakat. Di sisi lain Kumar (2002) menilai bahwa pendekatan partisipatif dapat mendorong keterlibatan langsung masyarakat lokal dalam proyek pembangunan dapat meningkatkan relevansi dan akseptabilitas solusi yang dihasilkan.⁴⁴

2. Kerangka Konseptual

a. Konsep Hubungan dan Implementasi

Menurut Tams Jayakusuma (2001) hubungan adalah suatu kegiatan tertentu yang membawa akibat kepada kegiatan yang lain.⁴⁵ Sedangkan implementasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yakni *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi juga dipahami sebagai penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan (Dewi *et al*, 2020).⁴⁶

⁴⁴ Jumalia, Rizal, dan Faisal. 2024. *Transformasi Digital dan Partisipasi Masyarakat: Mewujudkan Keterlibatan Publik yang Lebih Aktif*. Jurnal Administrasi Publik, Vol.12, No.1, hlm. 56-57.

⁴⁵ Udi Iswadi dan Mahfudoh Haerani. 2020. *Analisa Dan Pengaruh Metode Hubungan Industrial Terhadap Penyelesaian Perselisihan Di Serikat Pekerja Sektoral Kota Cilegon Tahun 2019*. Jurnal Ekono Insentif, Vol. 14, No. 2, hlm. 94. DOI: <https://doi.org/10.36787/jei.v14i2.291>.

⁴⁶ Dewi Yuni Lestari, Ishak Kusnandar, dan Didin Muhafidin. 2020. *Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Kabupaten Pangandaran*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol 7, No. 1, hlm. 184.

b. Konsep Fungsi Legislasi DPRD

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 365 dan 366, fungsi legislasi DPRD yakni membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama Bupati/Walikota serta membahas dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan oleh Bupati/Walikota.

c. Konsep Optimalisasi

Asep dan Irvanda (2022) menyebutkan bahwa optimalisasi merupakan proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi.⁴⁷

d. Konsep *Good Governance*

Prinsip-prinsip *good governance* menurut *United Nation Development Programme* (UNDP) terdiri atas Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan, Aturan hukum, Partisipasi masyarakat, Efisiensi dan efektivitas, Kesetaraan, Tegaknya supremasi hukum, Visi strategis, Responsif.⁴⁸

G. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah ilmu tentang metode yang secara substansial berisi tentang asas-asas umum atau prinsip-prinsip yang berlaku umum terhadap metode. Jadi, metodologi merupakan fondasi dari suatu metode. Sebagai ilmu tentang metode,

⁴⁷ Asep Hidayat dan Irvanda. 2022. *Optimalisasi Penyusunan Dan Pembuatan Laporan*. Jurnal Hospitality, Vol 11, no 1, hlm. 283.

⁴⁸ Andi Sulfiani. 2021. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 17, No. 1, hlm. 102-103.

metodologi meletakkan dasar-dasar umum yang harus ada dalam suatu metode secara ilmiah.⁴⁹

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).⁵⁰

Maka, salah satu langkah yang penting dalam penelitian yakni penentuan metode penelitian. Metode penelitian dapat membantu memecahkan suatu masalah. Hal ini berarti menempatkan metode penelitian sebagai unsur utama mendukung terlaksananya penelitian karena memuat mekanisme memperoleh data.⁵¹ Selain itu dalam dunia riset, penelitian merupakan aplikasi atau penerapan metode yang telah ditentukan dengan persyaratan yang sangat ketat berdasarkan tradisi keilmuan yang terjaga sehingga hasil penelitian yang dilakukan memiliki nilai ilmiah yang dihargai oleh komunitas ilmuwan terkait (intersubjektif).⁵²

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model penelitian kuantitatif. Perlu diketahui bahwa penelitian kuantitatif merupakan penelitian ilmiah yang sistematis

⁴⁹ Nurul Qamar dan Farah Rezah. 2020. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal*. Social Politic Genius, Sulawesi Selatan, hlm 7.

⁵⁰ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram, Nusa Tenggara Barat, hlm 30.

⁵¹ Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Penerbit Kiara Media, Jawa Timur, hlm 112.

⁵² Aarce Tehupeior. 2021. *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*. UKI Press, Jakarta, hlm 34.

terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai investigasi sistematis terhadap fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur dengan melakukan teknik statistik, matematika atau komputasi.⁵³ Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang didasari pada asumsi, kemudian ditentukannya variabel, dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode-metode penelitian yang valid, terutama dalam penelitian kuantitatif.⁵⁴

Sementara itu, pentingnya paradigma dalam sebuah penelitian menempatkan dalam layer utama pada metodologi penelitian yang mengarahkan peneliti untuk mencari pendekatan yang tepat dalam menjawab permasalahan penelitian.⁵⁵ Dalam hal ini, penulis melihat bahwa paradigma positivisme relevan dengan penelitian yang dilakukan karena penelitian ini berlandaskan pada paham empirisme positivisme melihat bahwa kebenaran berada dalam fakta-fakta yang dapat dibuktikan atau diuji secara empiris. Penelitian ini juga menjelaskan fenomena atau gejala yang terjadi sebagai gambaran akan keingintahuan dan keinginan untuk mendapat pemahaman mengenai implementasi fungsi legislasi DPRD dan penerapan prinsip-prinsip *good governance* Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Dalam penelitian ini juga penggunaan jenis data numerik atau data dalam bentuk angka-angka sebagai bahan utama untuk melakukan analisis

⁵³ Karimuddin Abdullah, *et al.* 2022. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, hlm 1.

⁵⁴ *Ibid*, hlm 3.

⁵⁵ Sundaro Hendrianto. 2022. *Positivisme Dan Post Positivisme: Refleksi Atas Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Perencanaan Kota Dalam Tinjauan Filsafat Ilmu Dan Metodologi Penelitian*. Jurnal Universitas Diponegoro. Vol 22, No 1, hlm 54. DOI: <https://doi.org/10.14710/mdl.22.1.2022.21-30>.

serta menggunakan statistik dalam melakukan analisis. Artinya penelitian kuantitatif memang berbasis filsafat positivisme.⁵⁶

Model penelitian kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan hubungan antara implementasi fungsi legislasi DPRD dengan optimalisasi prinsip-prinsip *good governance* oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Penulis berpandangan bahwa penelitian kuantitatif sesuai dengan harapan bahwa asumsi mengenai adanya korelasi implementasi fungsi legislasi DPRD terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

1. Populasi

Sugiyono (2001), Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek itu.⁵⁷ Sedangkan Margono (2004), Populasi merupakan seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan Margono (2004). Jadi populasi berhubungan dengan data, bukan manusianya. Kalau setiap manusia memberikan suatu data maka,

⁵⁶ Widia Andini, Diah Fitriani, dan Laila Purba. 2023. *Paradigma Penelitian Kuantitatif Dalam Jurnal Ilmiah Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran, Vol. 1, No 1, hlm 9.

⁵⁷ Abigail Soesana, *et al.* 2023. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yayasan Kita Menulis, Jakarta, hlm. 39.

demikianlah banyaknya atau ukuran populasi akan sama dengan banyaknya manusia.⁵⁸ Kemudian Margono (2004) populasi dapat dibedakan ke dalam hal⁵⁹ sebagai berikut:

- a. Populasi teoritis (*teoritical population*), yakni sejumlah populasi yang batas-batasnya ditetapkan secara kualitatif. Kemudian agar hasil penelitian berlaku juga bagi populasi yang lebih luas, maka ditetapkan dengan spesifikasi yang lebih rinci.
- b. Populasi yang tersedia (*accessible population*), yakni sejumlah populasi yang secara kuantitatif dapat dinyatakan dengan tegas.

Adapun populasi dalam penelitian ini mengacu pada jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2023 yakni 130.400 jiwa. Data tersebut bersumber dari hasil sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo Utara.⁶⁰

2. Sampel

Menurut Riduwan (2015) Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Selain itu Soekidjo (2005) menyebutkan sampel juga sebagian diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.⁶¹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sampel merupakan bagian dari populasi yang terpilih menjadi sasaran penelitian. Sampel dipahami sebagai bagian dari

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 40.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 41.

⁶⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo Utara. 2024. Kabupaten Gorontalo Utara Dalam Angka Tahun 2024. Vol 16, hlm 55.

⁶¹ Karimuddin Abdullah, *et al.* 2022. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, hlm.81.

populasi yang memiliki jumlah dan karakteristik (Sugiyono, 2014).⁶² Sementara itu Sampel juga dimengerti Sampel sebagai bagian yang mewakili populasi. Pernyataan ini memiliki dua makna, yaitu setiap unit dalam populasi harus memiliki kesempatan untuk dipilih sebagai bagian dari sampel, serta sampel dianggap sebagai representasi populasi atau populasi dalam skala kecil atau disebut miniatur populasi.⁶³

Dalam hal menentukan sampel penelitian ini menggunakan rumus slovin. Rumus Slovin dilakukan untuk populasi yang jumlahnya sudah diketahui secara pasti. Rumus Slovin biasa digunakan dalam penelitian dengan jumlah sampel yang sangat besar dengan metode survei. Tujuan penggunaan rumus ini adalah untuk mendapatkan sampel sesedikit mungkin tetapi dapat mewakili keseluruhan populasi.⁶⁴

⁶² Amruddin, et al. 2022. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Pradina Pustaka, Sukoharjo, hlm. 96.

⁶³ Muhammad Fiqri, Sri, dan Tina. 2022. *Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Marketplace Terbaik Menggunakan Metode AHP pada Kelurahan Gunung Batu*. Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer, Vol. 2, No. 2, hlm.272.

⁶⁴ Abigail Soesana, et al. 2023. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yayasan Kita Menulis, Jakarta, hlm. 45.

Adapun notasi dari rumus ini sebagai berikut:⁶⁵

Gambar 1.1
Rumus Slovin

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = sampel

N = populasi

e = tingkat kesalahan, untuk penelitian kuantitatif menggunakan tingkat 10%

Setelah menggunakan rumus slovin dalam menentukan sampel pada penelitian ini didapatkan sampel sebesar **400 orang** untuk dijadikan sebagai responden. Berikut ini rincian dari penerapan rumus slovin untuk menemukan sampel penelitian.

Gambar 1.2
Penerapan Rumus Slovin

- n = jumlah sampel yang dibutuhkan
- N = jumlah populasi (dalam kasus ini 130.400)
- e = margin of error (tingkat kesalahan, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk desimal, misalnya 5% = 0,05)

Jika kita anggap margin of error $e = 0,05$ (5%), maka:

$$n = \frac{130.400}{1 + 130.400 \cdot (0,05)^2}$$

⁶⁵ Rizka Zulfikar, *et al.* 2024. *Metode Penelitian Kuantitatif (Teori, Metode dan Praktik)*. Widina Media Utama, Bandung, Jawa Barat, hlm. 193.

Gambar 1.2.1 Penerapan Rumus Slovin

Sekarang, kita hitung langkah demi langkah:

1. Kuadratkan margin of error: $0,05^2 = 0,0025$
2. Kalikan dengan populasi: $130.400 \cdot 0,0025 = 326$
3. Tambahkan 1: $1 + 326 = 327$
4. Bagi populasi dengan hasil langkah sebelumnya: $\frac{130.400}{327} \approx 399,4$

3. Pengambilan Sampel

Teknik sampling dalam penelitian ini yakni menggunakan Teknik *probability sampling*. Teknik ini berorientasi pada proses pengambilannya yang memberikan peluang yang sama untuk setiap individu dalam mendapatkan kesempatan menjadi sampel penelitian.⁶⁶ Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*. Dalam teknik ini, setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai subjek. Seluruh proses pengambilan sampel dilakukan dalam satu langkah dengan masing-masing subjek dipilih secara independen dari anggota populasi lainnya.⁶⁷

4. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah komponen yang sudah ditentukan oleh seorang peneliti untuk diteliti agar mendapatkan jawaban yang sudah dirumuskan yaitu berupa kesimpulan penelitian. Variabel adalah komponen utama dalam

⁶⁶ Putri Azora. 2021. *Analisis Quick Count Dengan Menggunakan Metode Stratified Random Sampling Studi Kasus Pemilu Gubernur Kalimantan Barat 2018*. Jurnal Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya, Vol. 10, No.1, hlm. 45.

⁶⁷ Deri dan Dede. 2022. *Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik, Vol. 1, No. 2, hlm. 95.

penelitian, oleh sebab itu penelitian tidak akan berjalan tanpa ada variabel yang diteliti.⁶⁸ Berikut ini macam-macam variabel dalam ini penelitian diantaranya sebagai berikut:⁶⁹

a. Variabel Independen

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, *predictor*, *antecedent*. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas yang dapat mempengaruhi atau menjadi sebab peranakan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam *Structural Equation Modeling* (SEM) atau pemodelan persamaan structural, variabel independen disebut juga sebagai variabel eksogen. Adapun variabel independen dalam penelitian ini yakni Implementasi Fungsi Legislasi DPRD.

b. Variabel Dependen

Variabel ini disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen, variabel efek, variabel terpengaruh, variabel terikat, atau variabel tergantung. Dalam *Structural Equation Modeling* (SEM) atau pemodelan persamaan structural, variabel dependen disebut juga sebagai variabel Endogen. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini yakni Prinsip-Prinsip *Good Governance*.

c. Variabel Moderator

Variabel Moderator disebut sebagai variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel ini umumnya menjadi variabel independen

⁶⁸ Syafrida Hafni Sahir. 2021. *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia, Bantul, Yogyakarta, hlm. 16.

⁶⁹ Amruddin, et al. 2022. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Pradina Pustaka, Sukoharjo, hlm. 60-61.

kedua. Adapun variabel moderator dalam penelitian ini yaitu optimalisasi.

5. Definisi Variabel Penelitian

Berikut ini adalah definisi variabel penelitian yang terdiri dari definisi konseptual dan definisi operasional.

a. Definisi Konseptual

1) Implementasi Fungsi Legislasi DPRD

Suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda) kepada masyarakat yang melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil yang berdampak konstruktif. Hal ini bertujuan agar mencegah pemerintah mengambil dan melaksanakan kebijakan publik yang bertentangan dengan keinginan rakyat (Akuntabilitas Politik).

2) Optimalisasi

Upaya maksimum yang dilakukan untuk mencapai tujuan agar kebijakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini implementasi berorientasi pada penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan memberikan dampak berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan kebijakan lain yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan (Joko Pramono, 2020).

3) Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Hal ini berkaitan dengan bagaimana sebuah pemerintahan yang baik dijalankan berdasarkan beberapa prinsip yang meliputi partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi, responsivitas, dan supremasi hukum.

b. Definisi Operasional

1) Implementasi Fungsi Legislasi DPRD

Implementasi fungsi legislasi DPRD mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 pasal 365 dan 366 yakni penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), dan pengawasan Peraturan Daerah (Ranperda). Dalam fungsi ini DPRD berperan sebagai penghubung masyarakat dan eksekutif (Firman Andika *et al*, 2021) sehingga seyogianya mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 10 ayat 1.

2) Optimalisasi

Siringoringo (2005) menyimpulkan optimalisasi berhubungan pada keefektifan dan efisiensi, produktifitas, kesesuaian strategi, dan keberlanjutan.

3) Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia merumuskan aspek fundamental tentang *good governance* yang

meliputi Partisipasi (Keterlibatan masyarakat dalam keputusan politik/kebijakan publik), Akuntabilitas (Tanggungjawab atas keputusan politik/kebijakan publik), Transparansi (Keterbukaan dan pemberian akses terhadap keputusan politik/kebijakan publik), Efektifitas dan Efisiensi (Berdaya dan berhasil guna), Responsivitas (Kepekaan dan cepat tanggap), Supremasi Hukum (Penegakan hukum dan norma-norma yang berlaku).

6. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian pada Penelitian Kuantitatif dalam Creswell (2014) terdiri dari:⁷⁰

a. Angket atau Kuesioner

Instrumen ini berisi serangkaian pertanyaan yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden. Pertanyaan dapat berupa pertanyaan tertutup dengan pilihan jawaban yang telah ditentukan atau pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden memberikan tanggapan bebas.

b. Daftar Periksa Observasi Terstruktur

Instrumen ini digunakan dalam pengamatan terstruktur. Instrumen memuat item-item pengamatan yang telah ditentukan sebelumnya. Peneliti menggunakan daftar periksa ini untuk mencatat dan mengukur variabel-variabel yang diamati selama proses pengamatan.

⁷⁰ Ardiansyah, Risnita, dan M.Syahrani. 2023. *Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 2, hlm. 5-6.

c. Instrumen Pengukuran Dalam Eksperimen

Instrumen ini mencakup alat atau metode yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang terlibat dalam eksperimen. Instrumen ini dapat berupa skala pengukuran, perangkat elektronik, atau alat pengukur lainnya yang digunakan untuk mengumpulkan data numerik yang diperlukan.

d. Kuesioner Survei

Instrumen ini merupakan instrumen yang digunakan dalam studi survei. Instrumen ini memuat serangkaian pertanyaan yang dikirimkan kepada responden untuk diisi. Kuesioner survei dirancang untuk mengumpulkan data numerik yang dapat dianalisis secara statistik untuk mendapatkan pemahaman tentang karakteristik populasi yang lebih luas.

Adapun instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan kuesioner yang kemudian didistribusikan secara langsung (tatap muka) maupun melalui *google forms*. Perihal *google form*, Agustin Anggi *et al* (2017) mendefinisikannya sebagai sebuah website yang berguna untuk merencanakan acara, mengirim survey, dan memberikan kuis atau evaluasi ke peserta didik. *Google form* juga memungkinkan pengguna untuk membuat formulir online untuk memasukkan data berupa kuisisioner, angket, atau lembar formulir pendaftaran. Dengan menggunakan *google form* tes instrumen soal dapat dilakukan tanpa menggunakan banyak kertas, dan tidak menggunakan banyak waktu untuk memperoleh data dan menganalisisnya. Selain itu oleh Hamdani (2017) mengatakan bahwa *google*

form adalah salah satu layanan yang diberikan google untuk mengelola pendaftaran acara, jejak pendapat, membuat kuis, dan mengerjakan kuis secara online. Sementara untuk manfaat *google form* yang lain, yaitu dapat membuat kuis yang membutuhkan jawaban pilihan ganda dan uraian. Selain itu, tampilan *google form* juga lebih menarik dan mudah disebarluaskan kepada responden berupa *link* untuk mengaksesnya. Irmaya dan Titin (2020) pun memaparkan bahwa penilaian dengan sistem online menjadikan penilaian tersebut lebih efisien dalam hal waktu, pendanaan, dan pencapaian suatu tujuan penilaian.⁷¹

Di sisi lain kelemahan menggunakan instrumen penelitian melalui kuesioner juga tidak dapat dihindarkan. Penggunaan kuesioner bisa saja menghasilkan data kurang valid sehingga diperlukan skala untuk membantu validitas dari instrumen penelitian tersebut. Dalam hal mengatasi persoalan ini maka penelitian ini menggunakan *skala likert*. Skala Likert ialah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang.⁷² Skala yang digunakan berdasarkan pada *skala likert*, dengan 5 opsi jawaban, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

⁷¹ Wahdatul Wahidah, Lina Arifah, dan Nur Kuswanti. 2022. *Pengembangan Instrumen Soal Berbasis Google Form Pada Materi Sistem Pernapasan Pada Manusia Kelas VIII MTS*. Jurnal Kependidikan, Pembelajaran, dan Pengembangan, Vol. 4, No. 1, hlm. 3..

⁷² Amelia Aditya Santika, et al. 2023. *Penerapan Skala Likert Pada Klasifikasi Tingkat Kepuasan Pelanggan Agen BRILink Menggunakan Random Forest*. Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi, Vol. 11, No.3, hlm. 406.

7. *Blueprint* Variabel Penelitian

Desain penelitian merupakan panduan atau rencana terperinci yang berfungsi sebagai cetak biru (*blueprint*) untuk pelaksanaan penelitian secara menyeluruh. Rencana ini meliputi penentuan variabel-variabel yang akan digunakan beserta metode pengukurannya, pemilihan sampel, pengumpulan data yang diperlukan untuk pengujian hipotesis, serta analisis data atau hasil yang diperoleh.⁷³ Berikut ini adalah *Blueprint* dari setiap variabel penelitian dalam penelitian ini.

a. Implementasi Fungsi Legislasi DPRD

Disadur dari jurnal Heriyanto (2023) tentang Penguatan dan Optimalisasi Fungsi Lembaga Legislatif di Daerah⁷⁴ kemudian dari Khairi (2020) tentang Fungsi DPRD Dalam Proses Pembuatan Kebijakan (Studi Kasus di Kota Sungai Penuh)⁷⁵ terdapat *blue print* variabel penelitian dari Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). Jadi *blue print* variabel penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1.1
Blueprint Variabel Penelitian Implementasi Fungsi Legislasi DPRD

Dimensi	Indikator	Pernyataan Dalam Kuesioner (Skala Likert)
Penyusunan Ranperda	DPRD mengidentifikasi kebutuhan masyarakat	1. DPRD melakukan survei kebutuhan masyarakat sebelum menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

⁷³ Benny S. Pasaribu, *et al.* 2022. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Media Edu Pustaka, Tangerang, Banten, hlm.25.

⁷⁴ Heriyanto. 2023. *Penguatan dan Optimalisasi Fungsi Lembaga Legislatif di Daerah*. Jurnal Administrasi Negara, Vol. 1. No. 4, hlm 253.

⁷⁵ Awal Khairi. 2020. *Fungsi DPRD Dalam Proses Pembuatan Kebijakan (Studi Kasus di Kota Sungai Penuh)*. Jurnal Qawwam: The Leader's Writing, Vol. 1, No.2, hlm. 43-44.

Dimensi	Indikator	Pernyataan Dalam Kuesioner (Skala Likert)
	Konsultasi publik dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).	2. DPRD aktif mengadakan konsultasi publik sebelum menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
	Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah.	3. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang disusun oleh DPRD mencerminkan prioritas pembangunan daerah.
Pembahasan Ranperda	DPRD melibatkan ahli dan pakar dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).	4. DPRD mengundang pakar atau akademisi untuk memberikan masukan dalam masukan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
	Pembahasan Ranperda dilakukan secara transparan.	5. Proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di DPRD diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
Pengesahan Ranperda menjadi Perda	Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dilakukan tepat waktu.	6. DPRD menyelesaikan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) sesuai jadwal yang telah disepakati.
	Dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) disiapkan dengan baik.	7. DPRD memastikan dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sudah lengkap sebelum disahkan.
Pengawasan Implementasi Perda	DPRD memantau pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda).	8. DPRD secara berkala memantau pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) di masyarakat.
	DPRD memberikan rekomendasi jika terdapat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda).	9. DPRD memberikan rekomendasi perbaikan kepada pihak terkait jika terdapat pelanggaran Peraturan Daerah (Perda).

(Sumber: diolah oleh Peneliti, 2024)

Berdasarkan *blueprint* ini terlihat bahwa Dimensi adalah merepresentasikan aspek-aspek utama dalam implementasi fungsi legislasi DPRD. Indikator adalah menggambarkan elemen-elemen spesifik yang ingin diukur dari masing-masing dimensi. Sedangkan Instrumen adalah pernyataan atau pertanyaan yang digunakan untuk mendapatkan data dari responden. Disamping itu skala pengukurannya jika menggunakan *Skala Likert* yakni 1–5 yang terdiri atas 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju.

b. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Soraya Zaidah dan Novi Khoiriawati tahun 2022 tentang Penerapan *Good Governance* Pada Pemerintah Kampung Empang Pandang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.⁷⁶ Kemudian Trisusanti Lamangida (2018) tentang Studi Implementasi *Good Governance* Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara⁷⁷ terdapat beberapa aspek yang dapat menjadi *blueprint* pada variabel penelitian prinsip-prinsip *good governance* sebagai berikut:

Tabel 1.2
Blueprint Variabel Penelitian Prinsip-Prinsip Good Governance

Prinsip <i>Good Governance</i>	Indikator	Pernyataan Dalam Kuensioner (Skala Likert)
Partisipasi	Masyarakat dilibatkan dalam	1. Pemerintah melibatkan masyarakat dalam proses

⁷⁶ Soraya Zaidah dan Novi Khoiriawati. 2022. *Penerapan Good Governance Pada Pemerintah Kampung Empang Pandang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak*. Jurnal Edunomika, Vol. 6, No. 2, hlm. 3.

⁷⁷ Trisusanti Lamangida. 2018. *Studi Implementasi Good Governance Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara*. Jurnal Publik: Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 6, No.2, hlm. 121.

Prinsip Good Governance	Indikator	Pernyataan Dalam Kuensioner (Skala Likert)
	pengambilan keputusan publik.	perencanaan program
	Ada ruang konsultasi publik sebelum kebijakan ditetapkan.	2. Pemerintah mengadakan forum diskusi dengan masyarakat sebelum mengambil keputusan penting.
Akuntabilitas	Laporan kinerja pemerintah dapat diakses masyarakat.	3. Pemerintah menyediakan laporan kinerja tahunan yang dapat diakses oleh masyarakat.
	Pemerintah bertanggungjawab atas kebijakan yang diambil.	4. Pemerintah memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kebijakan yang diambil.
Transparansi	Informasi kebijakan tersedia secara terbuka.	5. Informasi tentang anggaran daerah dapat diakses oleh masyarakat melalui situs resmi pemerintah.
	Proses pengadaan barang atau jasa dilakukan secara transparan.	6. Pemerintah mengumumkan tender proyek secara terbuka.
Efektivitas dan Efisiensi	Kebijakan yang diambil menghasilkan dampak yang positif.	7. Kebijakan pemerintah berhasil meningkatkan pelayanan publik.
	Sumber daya digunakan secara optimal.	8. Pemerintah menggunakan anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan.
Responsivitas	Pemerintah cepat merespons keluhan masyarakat.	9. Keluhan masyarakat ditanggapi dalam waktu yang cepat dan tepat.
	Pemerintah memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal.	10. Pemerintah memberikan prioritas kepada program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Supremasi Hukum	Semua pihak diperlakukan sama di depan hukum.	11. Pemerintah menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
	Proses hukum berlangsung sesuai dengan peraturan	12. Kasus-kasus hukum ditangani dengan transparan dan adil.

Prinsip Good Governance	Indikator	Pernyataan Dalam Kuensioner (Skala Likert)
	yang berlaku.	

(Sumber: diolah oleh Peneliti, 2024)

Berdasarkan *blueprint* dari variabel prinsip-prinsip *good governance* juga menggunakan *Skala Likert* yakni 1–5 yang terdiri atas 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju.

c. Optimalisasi

Berdasarkan penelitian dari Rio Febriant, Komang Adi, dan Putu Eka pada tahun 2024 tentang Optimalisasi Reformasi Birokrasi Terhadap Kinerja Pelayanan Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya⁷⁸ didapatkan beberapa dimensi dan indikator yang dapat dijadikan sebagai *blueprint* variabel penelitian optimalisasi sebagai berikut:

Tabel 1.3
Blueprint Variabel Penelitian Optimalisasi

Dimensi	Indikator	Pernyataan Dalam Kuesioner (Skala Likert)
Efektivitas	Tujuan utama tercapai.	1. Program atau kebijakan telah mencapai target yang ditetapkan.
	Dampak positif terhadap tujuan organisasi.	2. Pelaksanaan program menghasilkan manfaat yang nyata bagi pihak terkait.
Efisiensi	Penggunaan sumber daya.	3. Sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program dimanfaatkan secara optimal.
	Waktu yang digunakan untuk	4. Pelaksanaan program selesai tepat waktu tanpa

⁷⁸ Rio Febriant, Komang Adi, dan Putu Eka. 2024. *Optimalisasi Reformasi Birokrasi Terhadap Kinerja Pelayanan Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya*. Jurnal Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN), Vol. 2, No. 1, hlm. 318-319.

Dimensi	Indikator	Pernyataan Dalam Kuesioner (Skala Likert)
	mencapai hasil.	penundaan berarti.
Produktivitas	Peningkatan hasil atau <i>output</i> .	5. Progam meningkatkan produktivitas organisasi dalam memberikan pelayanan.
	Kualitas hasil.	6. Hasil program sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan.
Kesesuaian Strategi	Metode yang digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan.	7. Strategi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai optimalisasi.
	Relevansi pendekatan.	8. Pendekatan yang digunakan sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi atau masyarakat.
Keberlanjutan	Hasil dapat dipertahankan dalam beberapa waktu (jangka panjang).	9. Optimalisasi yang dilakukan memiliki dampak yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama.
	Mendukung keberlanjutan.	10. Pelaksanaan program didukung dengan mekanisme yang menjamin kelangsungan hasil.

(Sumber: diolah oleh Peneliti, 2024)

Berdasarkan blue print dari variabel optimalisasi juga menggunakan *Skala Likert* yakni 1–5 yang terdiri atas 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju.

8. Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Kualitas alat ukur sangat penting dalam penelitian kuantitatif karena akan menentukan kualitas data yang dihasilkan. Salah satu kriteria kualitas alat ukur adalah bahwa itu harus valid dan reliabel. Azwar (2012) menyebutkan bahwa validitas berdasarkan dari istilah *validity* yang memiliki pengertian seberapa jauh akurasi terhadap suatu tes atau skala pada menjalankan fungsi

pengukurannya.⁷⁹ Valid berarti bahwa alat ukur tersebut sesuai untuk mengukur apa yang diinginkan, sedangkan reliabel berarti bahwa alat ukur tersebut konsisten atau handal. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan dapat diandalkan, sangat penting untuk menggunakan instrumen penelitian yang valid dan dapat diandalkan.⁸⁰

a. Uji Validitas

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis Koefisien Korelasi Produk-Moment Pearson (*Pearson Product-Moment Corelation Coefficient*) dengan rumus sebagai berikut:⁸¹

Gambar 1.3
Rumus Korelasi Pearson

$$r_{xy} = \frac{\sum nXY - \sum X \sum Y}{\sqrt{(n \sum X^2 - (\sum X)^2)(n \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

n = jumlah observasi/ responden

x = skor total yang diperoleh dari seluruh item variabel

xy = skor total yang diperoleh dari seluruh item variabel y

Korelasi product moment dilambangkan (r) koefisien korelasi positif terbesar = 1 dan koefisien korelasi negatif terbesar = -1, sedangkan yang terkecil adalah 0. Bila hubungan antara dua variabel atau lebih itu mempunyai koefisien korelasi = 1 atau = -1, maka hubungan tersebut

⁷⁹ Zulpan dan Ahmad Rusli. 2020. *Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penilaian Membaca Short Functional Text Pada Siswa SMP Kelas VIII*. Jurnal Pendidikan Guru, Vol. 1, No. 1, hlm. 89.

⁸⁰ Dahlia Amelia, et al. 2023. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Aceh, hlm. 147.

⁸¹ Yulia Utama, Pria Muslim, dan Khairunnisa. 2023. *Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Instrumen Penilaian Kinerja Dosen*. Jurnal SAINTEK (Jurnal Sains dan Teknologi). Vol. 4, No.2, hlm 21-22.

sempurna.⁸² Selain itu untuk nilai signifikansi yang berkorelasi yakni $p = < 0,05$.⁸³

Tabel 1.4
Intepretasi Terhadap Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat Kuat

1) Uji Validitas Variabel Implementasi Fungsi Legislasi DPRD

Uji validitas variabel ini dilakukan terhadap 10 orang responden dengan menyajikan 9 pernyataan. Berikut ini hasil uji validitas variabel tersebut.

Tabel 1.5
Hasil Uji Validitas Variabel
Implementasi Fungsi Legislasi DPRD

Dimensi	P	Pearson's (r)	p-Value	Keterangan
Penyusunan Ranperda	1	0.758	0.011	Valid
	2	0.758	0.011	Valid
	3	0.671	0.034	Valid
Pembahasan Ranperda	4	0.732	0.016	Valid
	5	0.884	<.001	Valid
Pengesahan Ranperda menjadi Perda	6	-0.758	0.011	Valid
	7	0.793	0.006	Valid
Pengawasan Implementasi Perda	8	0.884	<.001	Valid
	9	-0.573	0.084	Tidak Valid

⁸² Bisma Indrawan dan Rina Kaniawati. 2020. *Pengaruh Net Interest Margin (NIM) Terhadap Return on Asset (ROA) Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Periode 2013-2017*. Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis), Vol. 4, No. 1, hlm. 82.

⁸³ Faradiba Jabnabillah dan Nur Margina. 2022. *Analisis Korelasi Pearson Dalam Menentukan Hubungan Antara Motivasi Belajar Dengan Kemandirian Belajar Pada Pembelajaran Daring*. Jurnal Sintak, Vol. 1, No. 1, hlm. 16.

Berdasarkan tabel uji validitas terhadap variabel implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten didapatkan bahwa dari 9 butir pernyataan yang disampaikan kepada 10 responden menghasilkan 8 butir pernyataan yang valid dan 1 pernyataan yang tidak valid yakni pada aspek pengawasan implementasi perda dengan butir pernyataan yang ke-9.

2) Uji Validitas Variabel Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Uji validitas variabel ini dilakukan terhadap 10 responden yang menyajikan 12 butir pernyataan. Setelah dilakukan uji validitas, berikut ini hasil dari uji tersebut.

Tabel 1.6
Hasil Uji Validitas Variabel Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Prinsip <i>Good Governance</i>	P	Pearson's (r)	p-Value	Keterangan
Partisipasi	1	0.742	0.013	<i>Valid</i>
	2	0.711	0.017	<i>Valid</i>
Akuntabilitas	3	0.698	0.019	<i>Valid</i>
	4	0.654	0.030	<i>Valid</i>
Transparansi	5	0.623	0.041	<i>Tidak Valid</i>
	6	0.667	0.027	<i>Valid</i>
Efektifitas dan Efisiensi	7	0.751	0.012	<i>Valid</i>
	8	0.682	0.023	<i>Valid</i>
Responsivitas	9	0.703	0.018	<i>Valid</i>
	10	0.748	0.013	<i>Valid</i>
Supremasi Hukum	11	0.598	0.051	<i>Tidak Valid</i>
	12	0.677	0.025	<i>Valid</i>

Berdasarkan tabel uji validitas terhadap variabel prinsip-prinsip *good governance* didapatkan bahwa dari 12 butir pernyataan yang disampaikan kepada 10 responden menghasilkan 10 butir

pernyataan yang valid dan 2 pernyataan yang tidak valid yakni pada indikator pemerintah cepat merespons keluhan masyarakat dan indikator proses hukum berlangsung sesuai.

3) Uji Validitas Variabel Optimalisasi

Sebagai variabel mediator, uji validitas variabel tetap dilakukan.

Adapun hasil dari uji validitas variabel tersebut yakni:

Tabel 1.7
Tabel Hasil Uji Validitas Variabel
Optimalisasi

Dimensi	P	Pearson's (r)	p-Value	Keterangan
Efektivitas	1	0.741	0.013	Valid
	2	0.712	0.016	Valid
Efisiensi	3	0.699	0.019	Valid
	4	0.681	0.023	Valid
Produktivitas	5	0.620	0.042	Tidak Valid
	6	0.658	0.029	Valid
Kesesuaian Strategi	7	0.744	0.012	Valid
	8	0.670	0.027	Valid
Keberlanjutan	9	0.705	0.017	Valid
	10	0.657	0.030	Valid

Berdasarkan tabel uji validitas terhadap variabel optimalisasi didapatkan bahwa dari 10 butir pernyataan yang disampaikan kepada 10 responden menghasilkan 10 butir pernyataan yang valid dan 1 pernyataan yang tidak valid yakni pada indikator peningkatan hasil dan output.

b. Uji Reliabilitas ⁸⁴

Uji reliabilitas adalah pemeriksaan kuesioner dengan indikator yang menunjukkan variabel atau konstruk. Uji reliabilitas digunakan untuk menentukan apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan konsisten selama pengukuran berulang. Alat ukur dianggap reliabel jika menghasilkan hasil yang konsisten bahkan setelah pengukuran berulang. Nursalam (2003) mendefinisikan reliabilitas sebagai kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan jika hal-hal dalam kehidupan diukur atau diamati berulang kali pada waktu yang berbeda. Cara Anda mengamati dan alat yang Anda gunakan sama-sama sangat penting. Jika hasil kuesioner tidak berubah dari waktu ke waktu, kuesioner dianggap handal atau reliabel. Adapun pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan melalui rumus Alpha Cronbach's sebagai berikut:

Gambar 1.4
Rumus Alpha Cronbach's

$$r_x = \left(\frac{n}{n-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_t^2}{\sigma_t^2} \right)$$

r_x = reliabilitas yang dicari

n = jumlah item pertanyaan

$\sum \sigma_t^2$ = jumlah varians skor tiap item

σ_t^2 = varians total

Perlu diketahui bahwa rentang nilai Alpha Cronbach's adalah $\alpha < 0.50$ reliabilitas rendah, $0.50 < \alpha < 0.70$ reliabilitas moderat, $\alpha > 0.70$ maka reliabilitas mencukupi (*sufficient reliability*), $\alpha > 0.80$

⁸⁴ Rokhmad Slamet dan Sri Wahyuningsih. 2022. *Validitas dan Reliabilitas Terhadap Instrumen Kepuasan Kerja*. Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 17, No.2, hlm.53.

maka reliabilitas kuat, $\alpha > 0.90$ maka reliabilitas sempurna. Semakin kecil nilai α menunjukkan semakin banyak item yang tidak reliabel. Suatu instrumen penelitian dikatakan dapat diandalkan (reliable) apabila nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$.

1) Uji Reliabilitas Variabel Implementasi Fungsi Legislasi DPRD

Berikut ini hasil uji reliabilitas terhadap variabel Implementasi Fungsi Legislasi DPRD.

Gambar 1.5
Hasil Uji Reliabilitas Variabel
Implementasi Fungsi Legislasi DPRD

Frequentist Scale Reliability Statistics ▼

Estimate	Cronbach's α
Point estimate	0.712
95% CI lower bound	0.465
95% CI upper bound	0.875

Note. The following item correlated negatively with the scale: P6. Variables P1 and P2 correlated perfectly. Variables P5 and P8 correlated perfectly.

Frequentist Individual Item Reliability Statistics

Item	If item dropped		mean	sd
	Cronbach's α	Item-rest correlation		
P1	0.602	0.736	4.700	0.483
P2	0.602	0.736	4.700	0.483
P3	0.628	0.620	4.500	0.527
P4	0.667	0.490	4.800	0.422
P5	0.590	0.836	4.800	0.422
P6	0.906	-0.888	4.300	0.483
P7	0.645	0.688	4.900	0.316
P8	0.590	0.836	4.800	0.422

Berdasarkan gambar hasil uji Cronbach's Alpha, berikut interpretasinya:

- Point Estimate (0.712)
 - ✓ Nilai Cronbach's Alpha menunjukkan reliabilitas internal skala yang digunakan.

- ✓ Nilai 0.712 berada dalam kategori baik (rentang 0.7–0.9).

Artinya, instrumen ini cukup andal untuk digunakan dalam penelitian.

- 95% Confidence Interval (CI)

- ✓ Lower Bound (0.465): Ini adalah batas bawah interval kepercayaan 95%. Jika nilai ini mendekati atau di bawah 0.6, maka ada kemungkinan reliabilitas kurang memadai.

- ✓ Upper Bound (0.875): Ini adalah batas atas interval kepercayaan. Menunjukkan bahwa reliabilitas maksimum masih berada dalam kategori baik.

- Korelasi Negatif (P6):

- ✓ Variabel P6 berkorelasi negatif dengan skala, yang menunjukkan bahwa item ini tidak konsisten dengan item lain. Hal ini dapat menurunkan reliabilitas.

- ✓ Sebaiknya item P6 diperiksa lebih lanjut, misalnya melalui analisis item-total atau revisi item.

- Korelasi Sempurna:

- ✓ P1 dan P2 serta P5 dan P8 berkorelasi sempurna.

- ✓ Ini mengindikasikan bahwa kedua pasangan item tersebut mungkin redundant (duplikat). Jika terlalu banyak item seperti ini, perlu dilakukan penghapusan atau penggabungan untuk mengurangi redundansi.

2) Uji Reliabilitas Variabel Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Berikut ini hasil uji reliabilitas dari variabel prinsip-prinsip *good governance*.

Gambar 1.6
Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Frequentist Scale Reliability Statistics ▼

Estimate	Cronbach's α
Point estimate	0.740
95% CI lower bound	0.313
95% CI upper bound	0.920

Note. The following items correlated negatively with the scale: P3, P10. Variables P1 and P6 correlated perfectly.

Frequentist Individual Item Reliability Statistics

Item	If item dropped		mean	sd
	Cronbach's α	Item-rest correlation		
P1	0.683	0.605	4.000	0.816
P2	0.698	0.549	4.300	0.675
P3	0.766	0.027	4.200	0.632
P4	0.692	0.559	4.000	0.816
P6	0.683	0.605	4.000	0.816
P7	0.705	0.496	4.400	0.699
P8	0.733	0.295	3.800	0.632
P9	0.692	0.559	4.000	0.816
P10	0.769	0.030	4.300	0.675
P12	0.740	0.228	2.400	0.516

Berdasarkan hasil uji reliabilitas Cronbach's Alpha pada gambar ini, berikut adalah interpretasinya:

- Point Estimate (0.740):
 - ✓ Nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.740 menunjukkan reliabilitas skala yang cukup baik. Ini berarti bahwa instrumen memiliki tingkat konsistensi internal yang memadai untuk digunakan dalam pengukuran.
- 95% Confidence Interval (CI):
 - ✓ Lower Bound (0.313): Batas bawah interval kepercayaan cukup rendah, mendekati nilai 0.3. Ini mengindikasikan

bahwa ada ketidakpastian dalam reliabilitas, mungkin karena adanya item yang tidak konsisten.

- ✓ Upper Bound (0.920): Batas atas menunjukkan reliabilitas maksimal dapat mencapai kategori sangat baik.
- ✓ Rentang interval kepercayaan yang cukup lebar mengindikasikan bahwa sampel atau jumlah item mungkin perlu ditinjau kembali untuk meningkatkan kepastian.
- Korelasi Negatif:
 - ✓ P3 dan P10 berkorelasi negatif dengan skala. Artinya, kedua item ini tidak konsisten dengan item lain dalam skala. Item tersebut berpotensi menurunkan nilai reliabilitas secara keseluruhan.
 - ✓ Disarankan untuk memeriksa isi atau perumusan item P3 dan P10 dan mempertimbangkan penghapusan atau revisi.
- Korelasi Sempurna:
 - ✓ P1 dan P6 berkorelasi sempurna, yang berarti kedua item ini mengukur hal yang sama dengan sangat mirip. Redundansi ini bisa mengurangi efisiensi instrumen.

3) Uji Reliabilitas Variabel Optimalisasi

Berikut ini merupakan hasil dari uji reliabilitas terhadap variabel optimalisasi.

Gambar 1.7
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Optimalisasi

Frequentist Scale Reliability Statistics

Estimate	Cronbach's α
Point estimate	0.763
95% CI lower bound	0.336
95% CI upper bound	0.932

Frequentist Individual Item Reliability Statistics ▼

Item	If item dropped		mean	sd
	Cronbach's α	Item-rest correlation		
P1	0.742	0.440	4.000	0.816
P2	0.730	0.571	4.500	0.527
P3	0.735	0.483	3.900	0.876
P4	0.728	0.533	4.000	0.667
P6	0.760	0.309	3.700	0.675
P7	0.797	0.061	4.100	0.738
P8	0.714	0.608	4.100	0.738
P9	0.737	0.469	4.400	0.699
P10	0.712	0.619	2.900	0.738

Berikut adalah interpretasi dari setiap elemen dalam tabel tersebut:

- Point Estimate (0.763):
 - ✓ Ini adalah nilai Cronbach's alpha yang menunjukkan tingkat konsistensi internal dari skala yang digunakan.
 - ✓ Nilai 0.763 menunjukkan bahwa skala tersebut memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Umumnya, nilai di atas 0.7 dianggap memadai untuk penelitian sosial.
- 95% CI Lower Bound (0.336):
 - ✓ Ini adalah batas bawah dari interval kepercayaan 95% untuk nilai Cronbach's alpha. Nilai 0.336 menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu, ada kemungkinan bahwa reliabilitas skala ini bisa serendah nilai ini.

- 95% CI Upper Bound (0.932):
 ✓ Ini adalah batas atas dari interval kepercayaan 95% untuk nilai Cronbach's alpha. Nilai 0.932 menunjukkan bahwa ada kemungkinan bahwa reliabilitas skala ini bisa setinggi nilai ini.

9. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah strategi komprehensif yang meliputi filosofi, metode, dan prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk memandu proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Pendekatan ini memiliki peran krusial karena memengaruhi cara penelitian dilakukan serta bagaimana hasilnya ditafsirkan, yang berimplikasi pada validitas dan kredibilitas temuan. Pemilihan pendekatan yang sesuai bergantung pada tujuan dan jenis penelitian yang dilakukan (Creswell, 2002).⁸⁵ Sementara itu perspektif peneliti untuk memilih spektrum ruang bahasan yang diharapkan mendapatkan penjelasan dari suatu substansi karya ilmiah disebut pendekatan penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengakses informasi yang berasal dari beragam aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab.⁸⁶

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian Kuantitatif.⁸⁷ Diketahui bahwa Penelitian Kuantitatif adalah penelitian yang masuk dalam kategori penelitian berdasarkan pendekatan. Penelitian Kuantitatif berorientasi pada prosedur penelitian yang menemukan

⁸⁵ Yurmaini, et al. 2024. *Pendekatan Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jurnal Hibrul Ulama: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keislaman, Vol. 6, No. 1, hlm. 84.

⁸⁶ Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Kiara Media, Jawa Timur, hlm. 58.

⁸⁷ Wiwik Sri Widiarty. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media, Kota Yogyakarta, hlm 53.

pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Pada dasarnya penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dengan teknik pengukuran yang cermat terhadap variabel tertentu, sehingga diakhir akan menghasilkan kesimpulan yang dipahami secara umum.⁸⁸

10. Jenis dan Sumber Data

Penulis melihat bahwa penelitian ini termasuk dalam penelitian terapan yang mana penelitian terapan merupakan penelitian yang dilakukan berkenaan dengan pemecahan masalah dan kenyataan-kenyataan praktis, penerapan pengembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Adapun penelitian ini bermanfaat bagi pemecahan masalah-masalah praktis.⁸⁹

Menurut Edi Riadi (2016:48) sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama, tanpa adanya perubahan atau perlakuan statistik. Data ini dianggap sebagai bentuk data yang paling murni. Untuk memperoleh data primer, peneliti harus mengumpulkannya langsung melalui metode seperti observasi, wawancara, diskusi terarah, dan distribusi kuesioner. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui angket (kuesioner) sebagai alat penelitian. Sedangkan data sekunder adalah informasi yang diperoleh tidak

⁸⁸ Manotar Tampubolon. 2023. *Metode Penelitian*. PT. Global Eksekutif Teknologi. Padang, Sumatera Barat, hlm. 16 .

⁸⁹ *Ibid*, hlm 12.

langsung dari objek yang sedang diteliti. Data ini biasanya berasal dari sumber seperti situs web atau referensi lain yang relevan dengan topik yang sedang dianalisis oleh penulis.⁹⁰

Sumber data dalam penelitian ini akan mengacu pada temuan-temuan yang dihasilkan berdasarkan proses pengamatan, wawancara, dialog, dokumentasi, analisis data sekunder serta penggunaan instrumen seperti kuesioner yang disampaikan kepada responden. Penelitian ini berorientasi pada analisis proses berpikir yang mengaitkan dinamika terhadap korelasi antar fenomena yang sedang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.⁹¹

Adapun penelitian ini melibatkan anggota DPRD dan staf, pejabat eselon II dan III serta masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara sebagai responden. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa asumsi, data, dan proyeksi dapat dipertanggungjawabkan secara sah karena berbasis ilmiah. Sumber data ini disebut sebagai sumber data primer karena data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.⁹²

11. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini karena penulis menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif maka teknik pengumpulan data yakni dengan survei. Survei adalah salah satu teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian

⁹⁰ Meita Sekar dan Muhammad Zefri. 2019. *Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Langkapura*. Jurnal Ekonomi, Vol. 21, No. 3, hlm. 311.

⁹¹ Tamaulina, et al. 2024. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Teori Dan Praktik)*. CV. Saba Jaya Publisir, Karawang, Jawa Barat, hlm. 104.

⁹² Abigail Soesana, et al. 2023. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yayasan Kita Menulis, Jakarta, hlm. 36.

kuantitatif. Survei dapat dilakukan dengan menggunakan kuesioner (angket), wawancara, atau kombinasi keduanya untuk mengumpulkan informasi dari responden.⁹³

Kuesioner (angket) merupakan kumpulan pertanyaan yang disampaikan kepada individu dengan tujuan agar mereka bersedia memberikan tanggapan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Orang yang diharapkan memberikan tanggapan tersebut disebut sebagai responden. Penggunaan angket adalah salah satu metode yang paling umum digunakan untuk mengumpulkan informasi dari subjek. Keunggulan angket termasuk efisiensi dalam biaya, penggunaan pertanyaan yang seragam untuk semua responden, serta kemampuan untuk menjaga kerahasiaan identitas responden. Angket dapat dirancang dengan menggunakan pernyataan atau pertanyaan, dan responden memberikan jawaban tertulis sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun kuesioner ini dapat disebarkan langsung kepada responden atau mengirimkan kuesioner tersebut kepada responden melalui pos, surat elektronik (*e-mail*), *Whatsapp* (WA), telegram, ataupun *google form*.⁹⁴

Sebagai alat untuk mendapatkan informasi dari responden, angket dianggap sebagai salah satu pilihan. Meskipun demikian, sebelum memutuskan untuk menggunakannya, peneliti disarankan untuk menilai apakah ada teknik lain yang lebih handal dan valid. Evaluasi ini mencakup pertimbangan terhadap kelebihan dan kelemahan masing-masing teknik. Angket merupakan

⁹³ Rizka Zulfikar, et al. 2024. *Metode Penelitian Kuantitatif (Teori, Metode dan Praktik)*. Widina Media Utama, Bandung, Jawa Barat, hlm. 71.

⁹⁴ Abigail Soesana, et al. 2023. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yayasan Kita Menulis, Jakarta, hlm. 52.

sarana efektif untuk menghimpun data dari sejumlah besar responden atau sumber data.

Kelebihan lainnya adalah kemudahan dalam menganalisis informasi yang terkumpul melalui penggunaan angket. Penggunaan angket memberikan keleluasaan kepada responden untuk memberikan jawaban sesuai dengan keyakinan mereka. Selain itu, keuntungan lainnya adalah bahwa responden tidak merasa tergesa-gesa dalam menjawab setiap pertanyaan, sehingga pengisian angket tidak terlalu terikat oleh keterbatasan waktu.⁹⁵

Selain itu menggunakan kuesioner (angket), dalam hal pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi yang merupakan pengamatan langsung dan sistematis terhadap perilaku, kejadian, atau fenomena tertentu tanpa campur tangan atau manipulasi oleh peneliti. Teknik bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai sebuah situasi atau konteks tertentu.⁹⁶ Jadi, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan hanya melalui Kuesioner (angket).

12. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menguraikan tentang metode yang digunakan untuk menguji atau membuktikan hipotesis yang diajukan serta harus dapat menjawab rumusan masalah.⁹⁷ Dalam hal menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi *Jeffrey's Amazing Statistics Program* atau JASP.

⁹⁵ Tamaulina, et al. 2024. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Teori Dan Praktik)*. CV. Saba Jaya Publisir, Karawang, Jawa Barat, hlm 192.

⁹⁶ Rizka Zulfikar, et al. 2024. *Metode Penelitian Kuantitatif (Teori, Metode dan Praktik)*. Widina Media Utama, Bandung, Jawa Barat, hlm 74.

⁹⁷ Amruddin, et al. 2022. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. CV. Pradina Pustaka Grup, Jawa Tengah, hlm. 214.

Aplikasi ini merupakan aplikasi olah data statistik gratis. Peneliti dari *Amsterdam University* terus mengembangkan dan memperbarui aplikasi ini (saat ini versi 0.16.4 pada Oktober 2022). Tujuan mereka adalah untuk membuat program statistik yang dapat diakses secara bebas dan gratis yang mencakup teknik statistik dasar serta teknik yang lebih kompleks (*advance*). Penekanan utama mereka adalah pada tampilan yang lebih sederhana.⁹⁸

Adapun beberapa teknik dalam analisis data untuk mengimplementasikan aplikasi JASP terhadap penelitian ini sebagai berikut:

a. Uji Asumsi Klasik

Ghozali (2018) menyebutkan bahwa Uji Asumsi klasik merupakan langkah awal sebelum analisis regresi linier berganda. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa koefisien regresi tidak bias, konsisten, dan mempunyai estimasi yang akurat. Uji Asumsi Klasik dilakukan untuk menunjukkan bahwa uji yang dilakukan memenuhi normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas data, dan pengujian dapat dilakukan dalam analisis regresi linier. Selanjutnya, jika suatu model baru lolos serangkaian pengujian terhadap asumsi klasik yang mendasarinya, maka dianggap cukup baik dan dapat digunakan untuk prediksi. Sehingga suatu model dikatakan baik untuk alat prediksi apabila mempunyai sifat-sifat tidak bias linier terbaik suatu penaksir.⁹⁹

⁹⁸ Mohammad Sofyan, *et al.* 2023. *Pelatihan Aplikasi ASP Bagi Peneliti Perkumpulan Dosen Peneliti Indonesia*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia, Vol. 2, No. 1, hlm. 90.

⁹⁹ Bobi Arisandi. 2022. *Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa*. Journal of Finance and Business Digital (JFBD). Vol. 1, No. 3, hlm. 175.

1) Uji Normalitas

Tujuan pengujian normalitas adalah untuk menguji apakah variabel independen dan dependen dalam suatu model regresi berdistribusi normal. Model regresi yang baik mempunyai distribusi data yang normal atau mendekati normal. Distribusinya tidak miring ke kiri atau ke kanan (kurva normal). Adapun kriteria pengujian uji Kolmogorov-Smirnov adalah nilai probabilitas (sig) $> 0,05$ maka data berdistribusi normal, sedangkan nilai probabilitas (sig) $<$ berarti data berdistribusi normal. Jika $0,05$ maka data tidak terdistribusi normal.¹⁰⁰

2) Uji Multikolienaritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linier di antara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Pengujian ini dilakukan dengan menganalisis nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dari masing-masing variabel independen. Apabila nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami masalah multikolinieritas.¹⁰¹

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menilai apakah terdapat perbedaan varians residual di antara pengamatan dalam model regresi. Jika varians residual konsisten di seluruh pengamatan,

¹⁰⁰ Niken Nanincova. 2019. *Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Noach Cafe and Bistro*. Jurnal AGORA, Vol. 7, No. 2. hlm. 2.

¹⁰¹ Gusthamy Pratama dan Maryam Mangantar. 2022. *Pengaruh Struktur Modal, Likuiditas, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Subsektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2020*. Jurnal EMBA, Vol. 10, No. 2, hlm. 340.

kondisi tersebut disebut homoskedastisitas. Namun, jika variansnya berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang ideal tidak mengalami heteroskedastisitas. Dikatakan bebas dari heteros kalau signifikan $> 0,05$, tetapi bila $\leq 0,05$ berarti mengandung masalah heteroskedastisitas.¹⁰²

4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel-variabel bebas dalam model prediksi yang dipengaruhi oleh perubahan waktu. Jika hasil nilai $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel bebas dalam model.¹⁰³

b. Uji Regresi Linier Berganda

Regresi linier adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan linier antara satu variabel independen dengan satu atau lebih variabel dependen. Dalam metode ini, variabel dependen dianggap sebagai hasil yang dipengaruhi oleh variabel independen, yang bertindak sebagai faktor yang memengaruhi. Analisis regresi linier berguna untuk menentukan arah dan kekuatan hubungan antara variabel-variabel tersebut, serta untuk memprediksi atau memperkirakan nilai variabel

¹⁰² Firsti Zakia dan Gerry Hamdani. 2022. *Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Konsentrasi Pasar Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016-2020*. Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan (JIMEK), Vol. 2, No. 2, hlm. 8.

¹⁰³ Djuli Sjafei, et al. 2021. *Pelatihan Penggunaan Software SPSS Dalam Pengolahan Regresi Linier Berganda Untuk Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun di Masa Pandemi Covid 19*. Jurnal Karya Abadi, Vol. 5, No. 2, hlm. 206.

dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diberikan.¹⁰⁴

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang disebutkan sebagai teknik regresi yang memiliki banyak variabel bebas. Satu diantara keunggulan analisis regresi linear berganda mampu menduga keadaan di masa depan melalui pengukuran beberapa variabel bebas (X) dengan variabel tidak bebas (Y).¹⁰⁵ Adapun rumus dari analisis regresi linier berganda yakni:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e^{106}$$

Keterangan:

Y = Prinsip-Prinsip *Good Governance*

a = Konstanta

b₁ = Koefisien Regresi X₁ = Implementasi Fungsi Legislasi DPRD

X₁ = Impelementasi Fungsi Legilasi DPRD

b₂ = Koefisien Regresi X₂ = Optimalisasi

x₂= Optimalisasi

e = Standar Error

Dalam menerapkan rumus analisis regresi linier berganda maka diperlukan beberapa uji sebagai berikut:

1) Uji T

Uji ini dilakukan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel

¹⁰⁴ Widya Reza. 2024. *Buku Ajar Analisis Regresi: Pendekatan Praktis dan Sistematis*. CV Eureka Media Aksara, Purbalingga, Jawa Tengah, hlm 126.

¹⁰⁵ Rahmadani Agung dan Helma. 2022. *Analisis Regresi Linier Berganda Untuk Melihat Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat*. Journal of Mathematics UNP, Vol. 7, No. 2, hlm. 63.

¹⁰⁶Aditya Anggara, et al. 2023. *Metode Regresi Linier Berganda Untuk Prediksi Omset Penyewaan Kamera di Joe Kamera*. Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika, Vol. 7, No. 1, hlm. 853.

terikatnya yang dianggap konstan.¹⁰⁷ Sehingga dalam hal ini terdapat dasar pengambilan kesimpulan dari hasil uji T sebagai berikut:

- a) Jika nilai signifikansi uji T $> 0,05$ maka hubungan Implementasi Fungsi Legislasi DPRD tidak berpengaruh terhadap optimalisasi prinsip-prinsip *good governance* di Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
- b) Jika nilai signifikansi uji T $< 0,05$ maka hubungan Implementasi Fungsi Legislasi DPRD mempengaruhi optimalisasi prinsip-prinsip *good governance* di Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

2) Uji F

Uji F digunakan untuk mengevaluasi apakah parameter dalam model regresi secara keseluruhan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, uji ini bertujuan untuk menentukan seberapa besar pengaruh gabungan dari semua variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.¹⁰⁸ Berikut ini dasar pengambilan kesimpulan dari hasil uji F yakni:

- a) Jika nilai signifikansi uji F $> 0,05$ maka hubungan Implementasi Fungsi Legislasi DPRD tidak berpengaruh terhadap optimalisasi

¹⁰⁷ Susianti Andi, et al. 2017. *Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Pompengan Jeneberang Sulsel*. Jurnal Profitability Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Vol. 1, No. 2, hlm. 149.

¹⁰⁸ Khusnul Nisa dan Febriyanto. 2021. *Pengaruh Disiplin Kerja, Kompensasi, Motivasi dan Pelatihan Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada PT. BPRS Metro Madani Kantor Pusat*. Jurnal Manajemen Diversifikasi, Vol. 1, No. 3, hlm. 721.

prinsip-prinsip *good governance* di Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

b) Jika nilai signifikansi uji $F < 0,05$ maka hubungan Implementasi Fungsi Legislasi DPRD mempengaruhi optimalisasi prinsip-prinsip *good governance* di Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

3) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya mengukur sejauh mana model regresi dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1, yang mencerminkan proporsi variabilitas yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Menurut Kuncoro (2019:240), koefisien determinasi berganda (R^2) digunakan untuk menilai sejauh mana model dapat menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R^2 menunjukkan kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen dalam bentuk persentase. Semakin besar persentasenya, semakin besar pula peran variabel independen (X) dalam mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya, jika persentasenya kecil, maka kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen juga kecil, sementara sisa pengaruhnya dapat disebabkan oleh variabel independen lain yang tidak termasuk dalam model

penelitian ini.¹⁰⁹ Adapun rumus uji Koefisien Determinasi sebagai berikut:¹¹⁰

$$D = R^2 \times 100 \%$$

Keterangan:

D = Koefisien Determinasi

R^2 = Kuadrat koefisien korelasi sederhana

100 % = Persentase Kontribusi

H. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gorontalo Utara yang melibatkan Anggota dan staf di DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara serta masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara.

I. Orisinalitas Penelitian

Sebuah penelitian harus memiliki sifat orisinal dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Tujuan dari hal ini adalah untuk menciptakan temuan baru yang mampu memberikan nilai tambah dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.¹¹¹

Tabel 1.8
Penelitian Terdahulu dan Novelty

Penelitian Terdahulu				Penelitian Tesis Ini
No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dwi Joko	Pelaksanaan	Tesis yang	Meneliti tidak hanya

¹⁰⁹ Greissela, Silvia, dan Ferdy Roring. 2023. *Analisis Pengaruh Harga, Promosi, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pengguna Aplikasi Lazada di Kota Manado*. Jurnal Riset Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi, Vol. 11, No.3, hlm. 6.

¹¹⁰ Fatmawati dan Anggia Lubis. 2020. *Pengaruh Perilaku Kewirausahaan Terhadap Kemampuan Manajerial Pada Pedagang Pakaian Pasar Pusat Pasar Kota Medan*. Jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis, Vol. 1, No. 1, hlm. 5.

¹¹¹ Trie Andari, et al. 2024. *Metodologi Penelitian (Panduan Lengkap Penulisan Karya Tulis Ilmiah)*. Sonpedia Publishing Indonesia, Kota Jambi, hlm.48.

Penelitian Terdahulu				Penelitian Tesis Ini
No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Rusriyanto	Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2021). ¹¹²	meneliti tentang pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD.	pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD namun hubungan fungsi tersebut dengan optimalisasi Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> melalui metode penelitian kuantitatif bukan penelitian hukum normatif. Selain itu penelitian ini dilakukan di wilayah yang berbeda yakni Kabupaten Gorontalo Utara.
2.	R.M. Iman Rifai Rusdi	Pengaturan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Pada Pemerintah Daerah yang Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). ¹¹³	Tesis yang memuat prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> .	Meneliti hubungan Fungsi Legislasi DPRD dengan optimalisasi prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> melalui metode penelitian kuantitatif bukan penelitian hukum normatif. Wilayah penelitian juga berbeda yakni di Kabupaten Gorontalo Utara.

¹¹² Dwi Joko Rusriyanto. 2022. Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2021). *Tesis*. Jakarta. Universitas Kristen Indonesia.

¹¹³ R.M. Iman Rifai Rusdi. 2022. Pengaturan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Pemerintah Daerah yang Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *Tesis*. Palembang. Universitas Sriwijaya.

Penelitian Terdahulu				Penelitian Tesis Ini
No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
3.	Boy Rahman Hasibuan	Implementasi Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Kantor Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah). ¹¹⁴	Tesis ini memuat implementasi prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> .	Penelitian ini tidak hanya memuat implementasi prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> melainkan meneliti hubungan implementasi Fungsi Legislasi DPRD dengan optimalisasi terhadap prinsip-prinsip tersebut. Selain itu penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian Kuantitatif bukan Kualitatif. Lokasi penelitian juga berbeda.

J. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memperoleh pemahaman dari penelitian ini, berikut ini susunan penulisan berdasarkan sifat umum sampai ke sifat khusus mulai dari Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, dan Bab V. Adapun susunan penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

¹¹⁴ Boy Rahman Hasibuan. 2019. Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Kantor Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah). Tesis. Medan. Universitas Medan Area.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Landasan Teori dan Konseptual, diantaranya berisikan tentang Kerangka Teori, Tinjauan Umum dan Kerangka Konseptual.

Bab III : Hubungan Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Dengan Optimalisasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* di Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara

Dengan judul pembahasan ini berisi hasil penelitian yang dimasukan dan dianalisis oleh penulis berdasarkan rumusan masalah pertama.

Bab IV : Pengaruh Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Dengan Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Governance* di Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

Memuat analisis pembahasan terhadap rumusan masalah kedua dalam penelitian.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, serta saran sebagai bab Penutup.